

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Tahun 2016 Sebanyak 48.290 keluarga sangat miskin Kabupaten Cilacap menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Cilacap, total nilai bantuan dana PKH yang diserahkan sebesar Rp 57.614.699.000.

Dalam rangka pemerataan akses dan kesempatan pendidikan Pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program wajib belajar masih ditemui kendala yaitu ada peserta didik putus sekolah atau rentan putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu sehingga orangtua tidak mampu membiayai pendidikan; yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan yang dengan keinginan sendiri tidak mau sekolah.

Pemerintah Indonesia secara formal telah berupaya dalam meratakan pendidikan, salah satu langkah yang telah ditempuh antara lain mengeluarkan kebijakan berupa program beasiswa. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, contohnya adalah dengan adanya program BOS untuk pendidikan dasar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar, tidak hanya berkaitan dengan

penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti dan melanjutkan jenjang sekolah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) mengatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal 11 ayat (2) memperkuat penjelasan tersebut bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam atau salah satu kabupaten yang memiliki sumber penghasilan dari kekayaan alam berupa laut. Kekayaan tersebut sangat dimanfaatkan oleh penduduk Kabupaten Cilacap khususnya dalam beratapencarian sebagai nelayan. Namun besarnya kekayaan alam yang berpotensi di Kabupaten Cilacap tidak sebanding lurus dengan tingginya angka melanjutkan pendidikan. Angka putus sekolah masih sangat memperhatikan mengingat banyak individu-individu memilih tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih membantu mencari nafkah orangtua. Selain itu adanya salah satu pulau yang menjadi sorotan dalam satu Indonesia yaitu biasa dikenal dengan Pulau Nusakambangan atau orang-orang daerah sekitar menyebutkan daerah Kampung Laut. Daerah tersebut memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari peradapat kota Kabupaten Cilacap dan cenderung memiliki masyarakat yang masih kurang mampu sehingga turut menyumbang angka putus sekolah.

Selain itu daerah-daerah kecamatan Kabupaten Cilacap lainnya yang tergolong masih dalam keluarga miskin cenderung masih banyak memiliki anak yang putus sekolah ataupun tidak sekolah dikarenakan faktor tertentu seperti minimnya biaya. Berikut tabel 1.2 berupa tabel persentase data penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Cilacap:

Tabel 1.1

Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2016

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/Belum pernah Sekolah	5,95	1,87
2. Tidak/Belum Tamat SD	23,18	24,99
3. Tamat SD/Sederajat	33,51	33,83
4. Tamat SLTP/Sederajat	21,10	16,44
5. Tamat SLTA/Sederajat	12,46	19,17
6. Tamat PT	3,81	3,70
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015,2016

Jika melihat data tabel diatas terlihat bahwa angka putus sekolah sama dengan persentase tidak/belum tamat SD yang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 23.18% menjadi 24.99%. Hal tersebut menandakan bahwa angka putus sekolah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lalu jika dilihat dari angka tamat SLTP/Sederajat terlihat bahwa angka tamatan SLTP/Sederajat mengalami penurunan, yang semula di tahun 2015 sebesar 21.10% sedangkan di tahun 2016 sebesar 16.44%. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap, baik dikarenakan faktor

biaya, maupun faktor lainnya yang menjadi kendala individu untuk menamatkan jenjang pendidikan.

Salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).¹

Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) Dan Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu Program Kartu Indonesia ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal yang rata-rata mereka berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta Program Keluarga Harapan (PKH).

¹ Agus Setyani Sugiyasari. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 Di Sma Negeri 11 Kota Yogyakarta. 2017. Hal. 4.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) yang bertujuan untuk: 1). Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, 2). Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, 3). Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah. 4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten yang masih banyak memiliki warga kurang mampu atau warga miskin walaupun Kabupaten Cilacap salah satu Kabupaten yang tergolong kaya akan sumber daya alamnya, dan di Kabupaten Cilacap pula terdapat salah satu pulau terpisah yang mana biasa dikenal dengan istilah Pulau Nusakambangan atau Kampung Laut yang masih kurang populer terhadap Program Indonesia Pintar, selain itu masih banyaknya masyarakat-masyarakat terpencil lainnya yang mengalami putus sekolah dan lebih memilih menjadi nelayan ataupun lebih membantu orangtua dalam mencari nafkah, mengingat bahwa Kabupaten Cilacap memiliki sektor kelautan yang memadai sebagai mata pencaharian. Maka dari itu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sangat diperlukan agar terwujudnya penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap. Oleh

karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui “*Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

- 1) Manfaat teoritis:**

- a. Untuk menambah, memperdalam serta mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan-ketentuan karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial terutama jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Menentukan jawaban atas masalah atau kendala-kendala pada peran peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

2) Manfaat Praktis:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar master pada Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.